

**IMPLEMENTASI PROGRAM BURUAN SAE (SEHAT, ALAMI,
EKONOMIS) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI
KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2020-2021
(STUDI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BANDUNG)**

¹Suci Desri Rahayu Putri

²Neneng Yani Yuningsih

³Ivan Darmawan

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi : suci.putri042000@gmail.com

ABSTRACT

The food problem is a serious issue that must be handled properly by the government, responding to this the Bandung City Government made an urban farming program called Buruan SAE. This program is the form of community empowerment activities that aim to make the community more independent in producing their own food needs so that the food produced can be healthier, natural and economic. The purpose of this study is to examine and describe how the implementation of the Buruan SAE Program in Bandung city through the theory of policy implementation according to Van Metter and Van Horn which consists of six aspects, namely the size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/trends of the implementers, communication between organizations and implementing activities, as well as the social, economic, and political environment. The method used is descriptive research with qualitative method. Based on the research results, the implementation of the Buruan SAE Program in Bandung city has not yet run optimally, this is due to limited human, financial, and facilities infrastructure, and the number of implementers involved is not proportional to the area so the program has not been implemented equally in Bandung city.

Keywords: Bandung City Government, Policy Implementation, Buruan SAE Program

ABSTRAK

Permasalahan pangan merupakan isu serius yang harus dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah, merespon hal tersebut Pemerintah Kota Bandung membentuk sebuah program *urban farming* yang dinamakan Buruan SAE. Program ini berbentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memproduksi kebutuhan pangannya sendiri sehingga pangan yang dihasilkan dapat lebih sehat, alami, dan ekonomis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan metode

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana, serta jumlah para pelaksana yang terlibat tidak sebanding dengan luas wilayah sehingga program belum terlaksana secara merata di Kota Bandung.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pemerintah Kota Bandung, Program Buruan SAE

PENDAHULUAN

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar yang paling penting bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan pangan untuk mempertahankan kehidupannya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban yang dimaksud yaitu mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang¹. Pangan dapat berasal dari produk pertanian, perkebunan, peternakan, perairan yang diolah maupun tidak yang dipergunakan untuk konsumsi manusia.

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Jika ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya maka hal tersebut dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik juga dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini

bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional².

Permasalahan pangan menjadi isu serius yang harus bisa ditangani dengan baik. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan pangan dan tercapainya ketahanan pangan di daerah, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu permasalahan pangan.

Bandung menjadi kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Semakin pesatnya perkembangan Kota Bandung memberikan dampak pada lahan-lahan pertanian di Kota Bandung yang semakin hari semakin terbatas. Lahan-lahan pertanian banyak dialihfungsikan menjadi daerah permukiman, gedung perkantoran, sentra perdagangan dan pusat-pusat aktivitas masyarakat lainnya, sehingga semakin sempit lahan yang digunakan untuk bercocok tanam.

Grafik 1.1 Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2020

¹ https://bphn.go.id/data/documents/peningkatan_kedaulatan_pangan.pdf Diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 19.30 WIB

² <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/> Diakses pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 19.40 WIB



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan informasi dari Survei Data Basis Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar lahan yang ada di Kota Bandung dijadikan sebagai permukiman dan sisanya untuk lahan lain seperti fasilitas umum, pemerintahan, perdagangan dan lain sebagainya. Hanya tersisa 7,9% dari luas lahan Kota Bandung yang dijadikan sebagai kawasan lindung

yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan³. Hal tersebut akan berpengaruh dan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ketersediaan pangan lokal yang dihasilkan Kota Bandung.

Tabel 1.1 Produksi Pangan di Kota Bandung Tahun 2017 - 2019

Jenis Komoditi	Luas Tanaman (Ha)			Luas Panen			Produksi (Ton)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pada Sawah	1,85 2,00	1,76 7,00	1,96 7,00	1,81 4,00	1,72 7,00	1,98 8,00	12,35 0,00	11,75 7,42	13,5 3
Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kacang Tanah	12,0 0	18,0 0	12,0 0	16,0 0	26,0 0	14,0 0	18,83	32,79	176,5
Ketela Pohon	29,0 0	32,0 0	17,0 0	33,5 0	46,0 0	19,0 0	298,1 5	789,9 1	2,92 6
Ketela Rambat	16,0 0	16,0 0	8,00	18,0 0	11,0 0	3,00	284,2 2	173,1 0	287,49

Sumber: Data Basis Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020

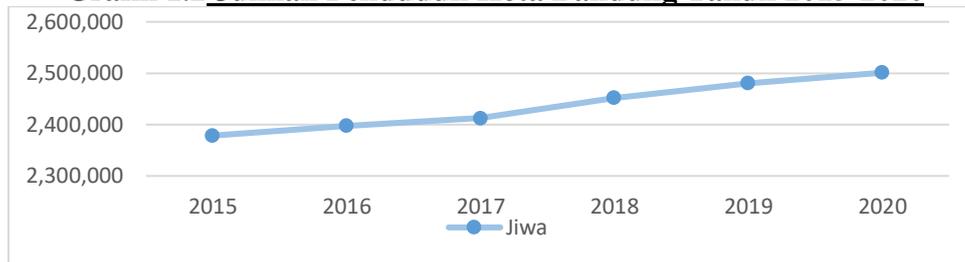
Berdasarkan data pada tabel, jumlah produksi pangan di Kota Bandung mengalami kenaikan atau penurunan pada tiap tahunnya. Seperti pada tanaman padi di tahun 2018 luas panen dan produksinya mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2019 mengalami kenaikan kembali.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Bandung juga dapat memengaruhi permasalahan pangan. Perubahan pada struktur dan jumlah penduduk akan sangat

berpengaruh terhadap pola konsumsi dan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan pangan akan bertambah besar pula. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan. Apabila pertumbuhan penduduk lebih pesat dibandingkan produksi pangan, maka akan timbul kelangkaan pangan.

³https://issuu.com/opendatabdg/docs/survei_data_basis_pembangunan_daerah_kota_bandung_

Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2015-2020

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan informasi dari data.bandung.go.id

Grafik di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kota Bandung setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2.378.627 jiwa kemudian di tahun 2020 bertambah sebanyak 122,340 jiwa menjadi 2.509.967 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan Kota Bandung memiliki tingkat pasokan pangan yang tinggi setiap harinya. Hal ini menjadikannya timpang jika dibandingkan dengan produksi pangan yang dihasilkan Kota Bandung sendiri. Hal tersebut menjadikan Bandung sebagai salah satu kota yang memiliki kebutuhan konsumsi pangan yang tinggi. Akan tetapi, saat ini Kota Bandung masih diposisi sebagai kota yang memiliki ketergantungan pangan dan belum bisa mandiri menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri. Saat ini, Kota Bandung memasok 96% kebutuhan pangan berupa beras, daging, bahan pangan, sayur dan buah dari luar kota.

Pada kondisi normal, setiap hari warga Kota Bandung membutuhkan sejumlah besar kebutuhan pangan diantaranya 120 ton telur yang sebagian besar dipasok dari Blitar dan Priangan Timur serta 600.000 ekor daging ayam. Dengan banyaknya bahan-bahan pangan yang dibutuhkan, maka kualitas dari bahan pangan yang didatangkan dari luar kota belum terjamin. Hal tersebut dapat

mengganggu keamanan dan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Isu serius dalam ranah ketahanan pangan kota tersebut dapat berpengaruh pada beberapa aspek seperti berpotensi inflasi dan kenaikan harga jika pasokan dengan permintaan tidak seimbang, rawannya ketersediaan pangan (*supply on demand*), serta rawannya kualitas pangan yang aman dan sehat⁴.

Untuk menghindari dari kelangkaan pangan dan tercapainya ketahanan pangan serta ketersediaan logistik pangan tentunya tidak lepas dari kewajiban pemerintah dalam mengatur melalui regulasi yang menunjang bagi ketahanan pangan. Agar setiap kebutuhan pangan terpenuhi, khususnya bagi masyarakat baik dengan regulasi berupa peraturan daerah ataupun peraturan yang mengikat lainnya mengenai kebijakan pangan⁵.

Merespon permasalahan pangan tersebut, maka Walikota Bandung Bapak Oded M Danial beserta jajarannya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menindaklanjuti dengan membentuk sebuah program *urban farming*. Program tersebut dinamakan "Buruan SAE (Sehat Alami Ekonomis)". Pelaksanaan program tersebut didasarkan oleh Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 520/E.086 – DISPANGTAN Tentang Pelaksanaan Kegiatan Urban

⁴ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020-2021

⁵

https://www.researchgate.net/publication/335719205_REGULASI_PEMERINTAH_DAERAH_JAWA

Janitra, Volume 3, Nomor 1, April 2023, Suci Desri Rahayu Putri

A_BARAT_MENGENAI_KEBIJAKAN_KETAHANAN_PANGAN_DAN_DALAM_PREALISASI_UNTUK_MEMENUHI_KEBUTUHAN_PANGAN_MASYARAKAT_JAWA_BARAT
Diakses pada tanggal 5 Agustus pukul 20.00 WIB

Farming Terintegrasi (Buruan SAE, Sehat Alami Ekonomis).

Buruan SAE merupakan program yang berbentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memproduksi kebutuhan pangannya sendiri sehingga makanan yang dikonsumsi dapat lebih sehat, alami, dan ekonomis, serta dapat menciptakan tata kelola lingkungan yang baik. Buruan SAE dilaksanakan pada tiap wilayah di Kota Bandung. Saat ini, terdapat 195 lokasi Buruan SAE yang telah terdaftar pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Untuk mengefektifkan pembinaan pada tiap kelompok Buruan SAE maka setiap kecamatan terdapat dua orang yang ditugaskan sebagai penyuluh serta pendamping. Setiap penyuluh dan pendamping kelompok, memegang dua wilayah kecamatan.

Berdasarkan observasi awal penulis, dapat diketahui bahwa Program Buruan SAE di Kota Bandung saat ini belum dilaksanakan secara merata pada tiap wilayah. Hal tersebut dilihat dengan terdapat perbedaan jumlah kelompok pada tiap wilayah kecamatan. Bahkan ditemukan beberapa kelurahan yang tidak terdapat kelompok Program Buruan SAE. Seperti pada Kecamatan Bojongloa Kaler dari lima kelurahan hanya terdapat satu kelompok Buruan SAE yaitu di Kelurahan Suka Asih RW 01. Berbeda dengan Kecamatan Bojongloa Kaler, di Kecamatan Cibiru tiap kelurahan telah terdapat kelompok Buruan SAE. Bahkan di Kelurahan Palasari terdapat lima kelompok. Alasan ketidakmerataan pelaksanaan program tersebut yaitu disebabkan oleh keterbatasan dari sumber daya lahan dan finansial. Keterbatasan sumber daya lahan diakibatkan oleh adanya alihfungsi lahan kosong untuk dijadikan daerah pemukiman atau rumah-rumah penduduk sehingga

lahan yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program terbatas. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat daerah di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru, menyebutkan bahwa dana untuk pelaksanaan program tersebut terbatas yang menyebabkan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam hal ini yaitu pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung ataupun pemerintah setempat melainkan harus bisa mandiri.

Dalam pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan publik tentunya akan ada sebuah model pengamatan dalam proses implementasi kebijakan. Salah satu model yang digunakan dalam melakukan pengamatan pada proses implementasi kebijakan pada penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn. Alasan mengambil model implementasi kebijakan ini karena model ini mengandaikan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel⁶.

Menurut Van Metter dan Van Horn terdapat enam aspek yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yaitu sumber daya yang mana keterbatasan dari sumber daya merupakan salah satu masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

⁶ Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 150-151

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata keadaan yang sebenarnya terkait situasi subjek perilaku atau fenomena yang terjadi serta informasi yang mendukung secara deskriptif dengan cara mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat terhadap suatu fakta dan sifat objek tertentu terkait dengan implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi pustaka dengan mengeksplor berbagai buku, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dan studi lapangan yang berupa wawancara (pedoman wawancara), observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan identifikasi SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung dalam Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan dapat dilakukan jika ukuran dengan tujuan dari kebijakan sesuai dengan sosial budaya dari pelaksana kebijakan, karena ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan maka akan sulit merealisasikan kebijakan tersebut hingga dapat dikatakan berhasil. Untuk melihat bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan maka harus dijabarkan terlebih dahulu latar belakang dibentuknya kebijakan, sehingga dapat diketahui ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Latar belakang dibentuknya Program Buruan SAE diawali dengan adanya fenomena atau realita bahwa Kota Bandung memiliki tingkat ketergantungan pangan yang tinggi dari luar kota dengan memasok

96% kebutuhan pangannya. Karena sulit untuk menambah luas lahan yang dipergunakan sebagai tempat produksi pangan, akhirnya sebagai solusi dibuatlah program *urban farming* yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan sebagai lokasi produksi pangan sehingga pangan yang dihasilkan dapat lebih terjamin. Selanjutnya Program Buruan SAE merupakan wujud dari pengembangan program sebelumnya yaitu Bandung Berkebun. Pada awalnya Program Bandung Berkebun ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya antusiasme masyarakat dan dalam kegiatannya masih berfokus pada satu sektor kegiatan saja yaitu budidaya tanaman sayuran. Kemudian karena program sebelumnya belum terlaksana secara maksimal dan ketika itu ada pergantian jabatan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung pada pertengahan tahun 2019 maka dibentuklah Program Buruan SAE. Program Buruan SAE ini adalah skripsi/thesis Kepala Dinas ketika Diklatpim yang diimplementasikan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Dalam pengembangannya Program Buruan SAE terdiri dari delapan sektor kegiatan diantaranya pembibitan, budidaya tanaman sayuran, budidaya tanaman buah, budidaya tanaman obat, ternak ayam, ternak ikan, pengomposan, dan pengolahan hasil.

Kemudian, dibentuknya Program Buruan SAE didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dijabarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 520/E.086 – DISPANGTAN Tentang Pelaksanaan Kegiatan Urban Farming Terintegrasi (Buruan SAE, Sehat Alami Ekonomis). Dibentuknya Program Buruan SAE adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yaitu tentang pangan.

Selanjutnya tujuan dibentuknya Program Buruan SAE yaitu untuk merubah *mindset* masyarakat supaya mau memproduksi kebutuhannya sendiri di lingkungan sekitar melalui budidaya *urban farming* sehingga pangan yang dikonsumsi dapat lebih sehat, alami serta ekonomis. Dengan diterapkannya Program Buruan SAE diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan pangan serta dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung. Tujuan dari Program Buruan SAE telah direalisasikan dengan baik yang mana hal tersebut diukur berdasarkan tingkat antusiasme masyarakat terkait adanya program ini dengan dibuktikan dari besarnya antusiasme masyarakat sehingga terdapat 570 ajuan kelompok baru. Namun dalam penerapannya masih belum optimal karena dari banyaknya ajuan kelompok yang dapat diakomodir dengan anggaran yang tersedia hanya sekitar 40 kelompok.

Implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung dalam Aspek Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang mendukung jalannya proses implementasi Program Buruan SAE. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menunjang proses implementasi Program Buruan SAE adalah tenaga ahli penyuluh dan pendamping. Terdapat perbedaan antara tenaga ahli penyuluh dengan tenaga ahli pendamping. Untuk tenaga ahli penyuluh secara tupoksi menyelenggarakan seluruh program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berhubungan dengan penyuluhan untuk membantu masyarakat. Tenaga penyuluh berstatus sebagai pegawai tetap yang berada di lingkungan Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian. Sedangkan untuk tenaga ahli pendamping mereka khusus hanya menjalankan tugas pada Program Buruan SAE dan berstatus sebagai pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak. Uraian tugas yang dilakukan tenaga ahli pendamping diantaranya:

- Pengumpulan data Buruan SAE meliputi produksi, sebaran hasil, nilai ekonomi dan data lainnya.
- Memfasilitasi pelaporan kelompok Buruan SAE.
- Pendataan potensi kelompok baru sesuai wilayah.
- Mempublikasikan kelompok Buruan SAE melalui media sosial.
- Melakukan pendampingan teknis Buruan SAE.
- Pengawasan Bantuan Pemerintah Program Buruan SAE.

Sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan Program Buruan SAE dinilai telah memadai dan sangat kompeten di bidangnya karena dipilih berdasarkan proses seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun, jika dilihat dari telah banyaknya kelompok Buruan SAE yang terbentuk pada tiap wilayah serta mempertimbangkan besarnya luas wilayah Kota Bandung, untuk jumlah tenaga ahli penyuluh dan pendamping belum mencukupi karena setiap penyuluh membawahi dua hingga tiga kecamatan sedangkan untuk pendamping membawahi dua kecamatan. Belum mencukupinya sumber daya manusia pada pelaksanaan Program Buruan SAE berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan ataupun pendampingan karena tiap penyuluh dan pendamping tidak bisa secara fokus mendampingi satu wilayah.

Sumber Daya Finansial

Sumber anggaran dana yang digunakan dalam penerapan Program Buruan SAE berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bandung dan APBN (Anggaran

Pendapatan Belanja Negara). Anggaran tersebut direalisasikan sebagai bantuan yang diberikan kepada kelompok Buruan SAE dalam bentuk barang atau sarana prasarana yang dipergunakan sebagai penunjang proses kegiatan Buruan SAE. Jadi anggaran yang tersedia dalam penerapan Program Buruan SAE direalisasikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana untuk penunjang kegiatan Program Buruan SAE.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan Program Buruan SAE belum dapat dikatakan cukup memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya ajuan kelompok baru hingga mencapai 570 ajuan sedangkan yang dapat diakomodir dengan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program hanya untuk sekitar 40 kelompok. Akibatnya dari total 335 kelompok yang telah terbentuk dan terdata di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya sebagian kelompok yang telah mendapatkan bantuan.

Karena anggaran yang tersedia terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap kelompok yang ada maka untuk ikut melaksanakan program, masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah melainkan harus mandiri. Sedangkan untuk bisa mandiri dengan cara swadaya itu masyarakat sedikit kesulitan karena dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tidak sedikit sebab yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Buruan SAE itu bukan hanya sebatas bibit tanaman atau benih akan tetapi ada juga sarana prasarana pendukung lainnya yang diperlukan.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain dari sumber daya finansial dan sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana juga sangat diperlukan sebagai penunjang proses implementasi kebijakan. Bantuan sarana dan prasarana

yang diberikan kepada setiap kelompok Buruan SAE diantaranya berupa:

- Media tanam seperti tanah lembang, sekam bakar, pupuk kandang dan *polybag*.
- Benih sayuran.
- Bibit sayuran buah.
- Tanaman produktif seperti jeruk nipis, jeruk purut dan jambu kristal.
- OTEGE (*Organic Tower Garden*).
- Budikdamber (ember plastik 80 liter, kran dan pot plastik).
- Kandang ayam.
- Benih lele, pakan lele, ayam, dan pakan ayam.

Sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang proses kegiatan Buruan SAE belum cukup memadai, hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran dana yang tersedia. Karena sarana dan prasarana yang tersedia terbatas dan belum bisa mencukupi semua kelompok maka bantuan sarana prasarana tidak serta merta diberikan kepada kelompok yang mengajukan bantuan, namun terdapat tahapan proses seleksi terlebih dahulu untuk menentukan kelompok mana yang memang benar-benar layak diberikan bantuan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak semua kelompok yang telah terbentuk mendapatkan bantuan dari total 21 kelompok di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan Kecamatan Cibiru hanya tujuh kelompok yang sudah mendapatkan bantuan.

Selanjutnya dalam implementasi Program Buruan SAE juga terdapat permasalahan yaitu adanya keterbatasan lahan yang digunakan untuk kegiatan Buruan SAE. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan di Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Cibiru, para informan di kelurahan maupun kecamatan mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Buruan SAE itu disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia, karena tidak setiap rt atau rw memiliki lahan

kosong atau lahan yang tidak dimanfaatkan. Akibatnya Program Buruan SAE belum bisa terlaksana pada tiap wilayah rw maupun rt.

Implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung dalam Aspek Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam penerapan Program Buruan SAE memiliki karakteristik struktur birokrasi yang jelas tersusun di mana pada tingkat atas dimulai dari Walikota Bandung sebagai Kepala Daerah, kemudian dalam penerapannya dibawah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang terdapat pada Bidang Ketersediaan Pangan dengan Seksi Pengembangan Pangan Lokal dan melibatkan juga kecamatan serta kelurahan yang berada di wilayah Kota Bandung. Selain itu peran dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun kecamatan serta kelurahan didasarkan oleh peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dan Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 520/E.086 – DISPANGTAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Urban Farming Terintegrasi (Buruan SAE, Sehat Alami Ekonomis).

Selanjutnya jumlah agen yang terlibat dalam penerapan program belum sebanding dengan luas wilayah Kota Bandung, karena untuk tenaga ahli penyuluh yang dilibatkan sebanyak 12 orang dengan membawahi dua hingga tiga kecamatan dan tenaga ahli pendamping sebanyak 15 orang dengan membawahi dua kecamatan dari jumlah total kecamatan se-Kota Bandung sebanyak 30 kecamatan yang mana tiap kecamatan memiliki kondisi wilayah yang berbeda-beda seperti luas wilayah, jumlah kelurahan, rw, serta jumlah Buruan SAE yang telah terbentuk.

Implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung dalam Aspek Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan ataupun penolakan dari (agen) pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan tersebut serta tanggapan atau respon terhadap kebijakan.

Para pelaksana Program Buruan SAE di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sangat paham terkait Program Buruan SAE. Karena sebelum program dilaksanakan pada awalnya dilakukan penguatan sumber daya manusia yang ada di internal terlebih dahulu dengan mengadakan pelatihan, penyajian materi, serta penyuluh maupun pendamping wajib mempelajari panduan-panduan yang tersedia sebelum ke lapangan. Selain dari adanya penguatan sumber daya manusia yang dilakukan sebelum program dilaksanakan, alasan para pelaksana sangat memahami program juga disebabkan oleh adanya proses seleksi untuk memilih penyuluh dan pendamping yang dilaksanakan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan.

Kemudian sikap para agen pelaksana juga dilihat dari respon mendukung atau tidaknya terhadap kebijakan. Seluruh agen pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mendukung adanya Program Buruan SAE yang dibuktikan dengan terdapat kegiatan penandatanganan komitmen dukungan dari pejabat struktural Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Respon pendukung juga diberikan oleh setiap kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Bandung karena Program Buruan SAE merupakan Program prioritas Pemerintah Kota Bandung jadi harus didukung, seperti apa

yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal bahwa “Untuk setiap kelurahan dan kecamatan keseluruhannya mendukung, karena Program Buruan SAE menjadi program prioritasnya Kota Bandung dan juga menjadi program prioritasnya dari pimpinan Kota Bandung”. Untuk bentuk dukungan yang diberikan oleh kecamatan dibuktikan dengan adanya kegiatan penandatanganan komitmen dukungan dari tiap camat se-Kota Bandung.

Implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung dalam Aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik antara pihak terkait diantaranya kecamatan dengan kelurahan, termasuk dengan Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kedua kecamatan beserta kelurahan terkait mengatakan bahwa pihak kecamatan maupun kelurahan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seperti ketika pembentukan kelompok, pengajuan bantuan sarana prasarana, serta hal-hal lain dalam proses implementasi Program Buruan SAE. Kemudian informasi Program Buruan SAE juga telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yaitu dengan membuat konten pada media sosial, mengadakan sosialisasi dan pelatihan, mengadakan acara seni atau konser, serta dibantu oleh pihak kelurahan beserta PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) atau penyuluh beserta pendamping yang berada di masing-masing wilayah.

Implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung dalam Aspek

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi Program Buruan SAE. Lingkungan eksternal yang ditinjau dari aspek sosial, adanya Program Buruan SAE sangat direspon dengan baik oleh masyarakat. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Cibiru menuturkan bahwa untuk di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Cibiru mayoritas masyarakatnya sangat mendukung adanya Program Buruan SAE karena melalui program ini aktivitas masyarakat dapat tersalurkan dengan hal positif yaitu kegiatan *urban farming*.

Kemudian juga sedikitnya telah membantu perekonomian dengan menghasilkan pangan di halaman sekitar serta dapat menjalin hubungan komunikasi antar tetangga. Selain itu berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa informan masyarakat pelaksana program, respon yang diberikan masyarakat sekitar juga sangat bagus hal tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mau ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Selanjutnya dari aspek ekonomi dalam penerapan Program Buruan SAE memiliki cukup banyak pengaruh. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan program belum bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan semua kelompok yang ada. Dari banyaknya kelompok yang mengajukan bantuan sarana dan prasarana tidak semua bisa mendapatkan bantuan tetapi akan dilaksanakan tahapan proses seleksi untuk memilih kelompok mana yang benar-benar layak mendapatkan bantuan.

Terakhir dari segi politik Program Buruan SAE sangat didukung oleh pemerintah, seperti apa yang disampaikan oleh Staf Seksi Pengembangan Pangan

Lokal bahwa, “Kondisi lingkungan kalo secara kebijakan waktu alm Pak Oded itu sangat mendukung karena jika tidak mendukung maka kita tidak bisa bekerja sebetulnya secara birokrasi”. Dilihat dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Program Buruan SAE telah mendapatkan dukungan dari sisi politik, karena jika tidak mendapatkan dukungan maka program tidak akan bisa berjalan.

Identifikasi SWOT dalam Implementasi Program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021

Identifikasi SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*) merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Berikut merupakan paparan SWOT secara sederhana:

Kekuatan (*Strength*)

1. Terdapat sumber daya manusia yaitu tenaga ahli penyuluh dan tenaga ahli pendamping yang memadai dan kompeten.
2. Tersedianya anggaran yang berasal dari APBD dan APBN.
3. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan para pelaksana terjalin dengan baik.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya sumber daya manusia yaitu tenaga ahli penyuluh dan tenaga ahli pendamping.
2. Terbatasnya anggaran dana yang tersedia.
3. Terbatasnya sumber daya sarana dan prasarana.
4. Sarana untuk publikasi program masih terbatas.

Peluang (*Opportunity*)

1. Tingginya antusiasme masyarakat terkait Program Buruan SAE.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Adanya dukungan dari para CSR (*Corporate Social Responsibility*) terkait bantuan.

Ancaman (*Threat*)

1. Terbatasnya lahan untuk dimanfaatkan menjadi Buruan SAE.

Upaya Alternatif Terhadap Hasil Identifikasi SWOT dalam Implementasi Program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021

Berdasarkan pemaparan identifikasi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam implementasi Program Buruan SAE di atas, peneliti menyusun beberapa strategi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Strategi SO (*Strength – Opportunity*)

Mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh tenaga ahli pendamping kepada setiap kelompok Buruan SAE, hal ini dilakukan agar kualitas tiap kelompok yang sudah terbentuk menjadi lebih meningkat.

b. Strategi ST (*Strength – Threat*)

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pelaksana yaitu kecamatan dengan kelurahan, hal ini dilakukan agar kecamatan dengan kelurahan dapat membantu mengupayakan tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pelaksanaan program.

c. Strategi WO (*Weakness – Opportunity*)

- Menambah besaran anggaran dana yang digunakan untuk menunjang kebutuhan sarana prasarana, hal ini dilakukan agar jumlah kelompok yang mendapatkan

bantuan sarana prasarana dapat lebih bertambah.

- Meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama dengan para CSR (*Corporate Social Responsibility*), hal ini bertujuan agar kelompok Buruan SAE yang terbentuk bisa mendapatkan lebih banyak peluang untuk difasilitasi oleh para CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut.

d. Strategi WT (*Weakness – Threat*)

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan sarana komunikasi yang lebih beragam, hal ini dilakukan agar informasi terkait Program Buruan SAE dapat lebih tersebar luas kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai implementasi Program Buruan SAE di Kota Bandung pada tahun 2020-2021, maka didapat simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Buruan SAE bertujuan untuk merubah *mindset* masyarakat supaya mau memproduksi kebutuhan pangannya sendiri di lingkungan sekitar melalui budidaya *urban farming* sehingga pangan yang dikonsumsi dapat lebih sehat, alami serta ekonomis. Melalui Program Buruan SAE diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan pangan serta dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung. Tujuan dari Program Buruan SAE telah direalisasikan dengan baik, yang diukur berdasarkan tingkat anusiasme masyarakat dengan dibuktikan dari besarnya antusiasme

masyarakat sehingga terdapat 570 ajuan kelompok baru.

2. Sumber daya dari segi sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi Program Buruan SAE dinilai telah memadai dan sangat kompeten di bidangnya. Namun, jumlah sumber daya manusia yaitu tenaga ahli penyuluh dan pendamping yang tersedia belum mencukupi. Kemudian untuk sumber daya dari segi finansial dan sarana prasarana masih belum mencukupi dan memadai. Selain itu lahan kosong yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan Program Buruan SAE juga terbatas.
3. Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Program Buruan SAE memiliki karakteristik struktur birokrasi yang jelas serta untuk peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jumlah agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi Program Buruan SAE belum sebanding dengan kondisi dan luas wilayah Kota Bandung.
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana dalam implementasi Program Buruan SAE secara keseluruhan memberikan respon yang sangat baik, di mana para pelaksana mendukung serta sangat memahami terkait Program Buruan SAE.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dalam hal ini koordinasi dan komunikasi antar agen pelaksana yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kota Bandung dengan kecamatan maupun kelurahan telah berjalan dengan baik. Selain itu komunikasi kepada masyarakat juga telah terlaksana dengan baik.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi Program Buruan SAE memiliki pengaruh. Adanya dukungan dari lingkungan sosial yaitu antusiasme masyarakat, kemudian dukungan dari lingkungan sosial berkaitan dengan anggaran yang merupakan faktor penting dalam menunjang proses implementasi, serta dari segi politik adanya dukungan dari pemerintah yaitu Kepala Daerah.

REFERENSI

Agustino, L. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 520/E.086 – DISPANGTAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Urban Farming Terintegrasi (Buruan SAE, Sehat Alami Ekonomis).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2020-2021

https://bphn.go.id/data/documents/peningkatan_kedaulatan_pangan.pdf Diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 19.30 WIB

<http://data.bandung.go.id/dataset?q=jumlah+penduduk+kota+bandung> Diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 21.00 WIB.

<https://buruansae.bandung.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 20.30 WIB.

https://issuu.com/opendatabdg/docs/survei_data_basis_pembangunan_daerah_kota_bandung Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

<http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/> Diakses pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 19.40 WIB

https://www.researchgate.net/publication/35719205_REGULASI_PEMERINTAH_DAERAH_JAWA_BARAT_MENGENAI_KEBIJAKAN_KETAHANAN_PANGAN_DAN_DALAM_PREALISASIANYA_UNTUK_MEMENUHI_KEBUTUHAN_PANGAN_MASYARAKAT_JAWA_BARAT Diakses pada tanggal 5 Agustus pukul 20.00 WIB

Sulastrri, L. 2016. Implementasi Program Kampung Berkebun (Urban Farming) di Kota Bandung Perbandingan Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Padjadjaran. <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/19138>.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dan beberapa informan masyarakat yang telah mendukung membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.